

PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

William Paschalino Carlos Chilavert

NPP. 30.1156

Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: paschalinowilliam@gmail.com

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): *This research is entitled "Social Protection Through the Family Hope Program (PKH) in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province." In this research, the main problem is poverty which is still high in Sikka Regency, which makes it difficult for them to fulfill their basic needs and improve their social status. Therefore, the government carries out the function of social protection through the social assistance of the Family Hope Program (PKH). Purpose: The purpose of this research is to describe and analyze social protection through the Family Hope Program (PKH) in Sikka Regency and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of social security through the Family Hope Program (PKH) in Sikka Regency. Method: This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Result: The results of the study show that social protection through the Family Hope Program (PKH) implemented by social services has been going well through data collection on poor families, distribution of assistance, assistance to beneficiary families, and empowerment of joint business groups. However, the social protection implemented still has several obstacles such as data collection problems, error data systems, updating of beneficiary data, geographical conditions, and behavior of beneficiaries who have not used PKH assistance properly. Conclusion: Therefore the local government through social services must as soon as possible solve the problem of data collection and updating data by reactivating the e-PKH application and there needs to be awareness from beneficiary families to make good use of PKH assistance to protect, fulfill basic needs, and improve social status.*

Keywords: *Poverty, Social Protection, PKH*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul "Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur." Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Sikka, yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan status sosial. Maka dari itu pemerintah melaksanakan fungsi perlindungan sosial melalui bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan sosial melalui program keluarga harapan

(PKH) di Kabupaten Sikka dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat perlindungan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sikka. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh dinas sosial sudah berjalan baik lewat pendataan keluarga miskin, penyaluran bantuan, pendampingan keluarga penerima manfaat dan pemberdayaan kelompok usaha bersama. Akan tetapi perlindungan sosial yang dilaksanakan masih ada beberapa kendala seperti masalah pendataan, system data yang error, pembaharuan data penerima bantuan, kondisi geografis, serta perilaku penerima bantuan yang belum memanfaatkan bantuan PKH dengan baik. **Kesimpulan:** Oleh karena itu pemerintah daerah melalui dinas sosial harus segera mungkin menyelesaikan masalah pendataan dan pembaharuan data dengan mengaktifkan kembali aplikasi *e-PKH* dan perlu ada kesadaran dari keluarga penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan PKH dengan baik guna melindungi, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan status sosial.

Kata Kunci: Kemiskinan, Perlindungan Sosial, PKH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan sosial merupakan salah satu elemen penting sebagai upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional (Suharto, 2009). Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari masalah sosial yang dialami oleh keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidup mereka dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Syarat minimal suatu masyarakat dikatakan sejahtera dilihat dari tiga syarat minimal yaitu: pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan). Kondisi yang terjadi saat ini masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera alasannya masih banyak ditemukan keluarga atau kelompok yang sampai saat ini hidup dibawah garis kemiskinan dan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar di atas. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi sebab fungsi suatu negara yaitu melindungi masyarakatnya. Suatu negara pada umumnya memiliki fungsi yang mana fungsi negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih sangat memerlukan perhatian dalam pemenuhan hak-hak di atas dikarenakan masih banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan perlindungan hukum serta kemiskinan yang masih terus terjadi di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa penduduk Indonesia masih berada pada kondisi miskin. Hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat miskin kesulitan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Pemerintah memiliki misi besar untuk menurunkan kemiskinan yang semakin melanda mengingat tingkat kemiskinan Indonesia menurut data dari BPS pada Maret 2022 sebesar 9,54%, data ini menurun 0,17% terhadap September 2021 dan menurun 0,60% terhadap Maret 2021, akan tetapi angka ini masih jauh dari harapan pemerintah yang menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7- 8% pada tahun 2019.

Kabupaten Sikka merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota kabupaten terletak di Maumere. Secara khusus di Kabupaten Sikka, masalah kemiskinan masih menjadi masalah pokok. Menurut Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021 angka kemiskinan penduduk Kabupaten Sikka berada pada 13,35% atau mencapai 43.090 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Sikka sebesar 324.252 jiwa yang dimana angka ini jauh melebihi angka kemiskinan pendudukan nasional. Suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar rata-rata hidup masyarakat suatu daerah. Berdasarkan kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang masih tinggi, namun ada penurunan setiap tahunnya. Kondisi miskin ini tentu saja perlu diantisipasi agar kondisi sosial masyarakat dapat kembali berada pada situasi yang normal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial maka muncul konsep perlindungan sosial yang mana konsep ini dirancang secara terencana oleh pemerintah untuk melindungi anggota masyarakat dari berbagai resiko kehidupan yang timbul dari dirinya maupun lingkungannya. Konsep perlindungan sosial mencakup salah satunya bantuan sosial. Di Kabupaten Sikka program-program yang dilaksanakan untuk perlindungan sosial lewat bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan non tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Salah satu bantuan yang masih dilaksanakan sampai sekarang guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sikka adalah Pelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka Pada peluncuran pertama tahun 2007, pemerintah memberikan bantuan kepada 5 Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sikka dengan menjangkau 7.565 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan setiap tahunnya penerima bantuan sosial PKH ini bertambah sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sampai dengan Januari 2023 penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di Kabupaten Sikka dengan total anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp. 3.000.000.000.-. dan calon penerima manfaat mencapai 20.192 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Sikka. Alasan dipilihnya bantuan sosial PKH dikarenakan bantuan PKH merupakan bentuk dari kebijakan Perlindungan Sosial yang ditujukan pemerintah secara khusus bagi masyarakat atau kelompok miskin dan mengalami kerentanan sosial agar tetap bertahan hidup dan berdaya sehingga dapat mewujudkan fungsi pemerintah untuk melindungi masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Sikka melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika dibandingkan dengan data penduduk miskin Kabupaten Sikka yang berjumlah 40.090 jiwa maka dari data realisasi penerima manfaat PKH tahun 2023 masih ada sebagian besar penduduk miskin di Kabupaten Sikka yang belum menjadi sasaran penerima manfaat program PKH tersebut. Untuk mengantisipasi jangkauan sasaran penerima manfaat yang belum tersentuh oleh PKH maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara pemutakhiran sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di tingkat daerah, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial menghimpun data-data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap Kabupaten/Kota yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan untuk kemudian diinput ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) yang setelah itu bantuan sosial yang sebagaimana dimaksudkan di atas disalurkan kepada masyarakat miskin berdasarkan yang telah terdaftar dalam DTKS. Pada tataran implementasi di lapangan pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Sosial telah melakukan pemutakhiran data DTKS sejak tahun 2017 selanjutnya dihimpun oleh Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke tingkat Kementerian Sosial guna ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya hingga tahun 2023 kelompok penduduk miskin penerima manfaat PKH adalah sebesar 20.192 jiwa, itupun yang mendapat bantuan PKH hanya sebesar 19.983 jiwa selebihnya sebanyak 209 jiwa masih berada pada daftar tunggu dalam sistem DTKS. Permasalahan data yang masih tergolong dalam inclusion error disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: (1) banyak keluarga mampu/sejahtera secara pendapatan finansial; (2) tidak ditemukan di desa/kelurahan (bukan warga desa/kelurahan); (3) Nomor Induk Kependudukan invalid; (4) Kartu Keluarga ganda; (5) bekerja sebagai aparat (TNI, Polri, ASN baik pensiunan maupun aktif maupun bekerja di kantor BUMN); dan (6) meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan bantuan PKH menjadi tidak tepat sasaran dikarenakan masih banyak keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan melainkan keluarga yang sudah dikatakan mampu masih saja terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Selain itu kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi yang jarang dilakukan sehingga data penerima terkesan tidak berubah.

Selain permasalahan kemiskinan yang masih tinggi serta masalah terkait pendataan Keluarga Penerima Manfaat adapun salah satu kesulitan yang memberi kontribusi terhadap proses perwujudan data yang akurat adalah karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Sikka yang sebagiannya berada pada daerah pegunungan dan sebagiannya lagi berada di wilayah kepulauan. Letak geografis Kabupaten Sikka dilihat dari luas wilayah sebesar 7.553,24 km² terdiri atas luas daratan 1.614,80 km² dan pulau-pulau kecil sebanyak 18 buah 117,11 km² serta luas lautan 5.821,33 km² dan luas daratan seluas 47.349,91 km². Melihat kondisi geografis yang sedemikian rupa untuk mengakses sampai ke pelosok daerah mengakibatkan ini menjadi masalah dalam perlindungan sosial. Di sisi lain juga upaya pendataan yang dilakukan masih menggunakan sistem pendataan manual karena tidak didukung oleh jaringan online. Dari kenyataan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian “Perlindungan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” dikarenakan pada prakteknya masih ditemukan kendala-kendala dalam penyaluran bantuan sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat sehingga belum terwujudnya perlindungan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sikka.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan, baik dalam konteks perlindungan sosial maupun konteks program keluarga harapan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Penelitian Bagong Suyanto (2019) dengan judul “Perlindungan Sosial Bagi Anak-Anak Miskin Di Perkotaan” menemukan bahwa Anak-anak dari keluarga miskin adalah kelompok anak rawan yang seringkali menanggung beban ganda, yakni sebagai penyangga ekonomi keluarga dan sekaligus hak dan kewajiban untuk melangsungkan pendidikannya. Masih banyak anak-anak dari keluarga miskin yang terpaksa mencari kerja sehingga mengalami terhambatnya proses tumbuh dan berkembang yang dimana fungsi perlindungan sosial belum berhasil. Penelitian Muhammad Luthfi (2019) dengan judul “Efektivitas Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah” menemukan bahwa efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan cukup baik ditandai dengan setiap proses pelaksanaannya berjalan lancar. Maka dari itu PKH sudah mampu mengatasi kemiskinan di desa Margajaya Kecamatan Ngamprah. Penelitian Baso Iping (2020) dengan judul “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial” menemukan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program bantuan dan telah berjalan lama khususnya pada masa pandemi Covid-19 dimana di sisi ekonomi memberikan dampak signifikan untuk mempertahankan daya beli dan meminimalkan PHK, namun dari segi sosial memicu gejolak korupsi. Penelitian Desy Vijayanti, Helly Ocktilia (2019) “Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin Peserta Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Buton Selatan” menemukan bahwa Ketersediaan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperoleh skor 3.001 pada kategori baik; tindakan pencegahan risiko diperoleh skor 2.053 pada kategori sangat baik; tindakan promotif diperoleh skor 1.226 pada kategori kurang baik, aspek peran transformatif diperoleh Skor 2.427 pada kategori sangat baik. Aspek tindakan promotif Perlindungan Sosial yang berada pada kategori kurang baik, diketahui masalah yang muncul adalah pada pelaksanaan Family Development Session (FDS). Penelitian Julianty Takaredase, J.E. Kaawoan, Frans Singkoh (2019) dengan judul “Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng” menemukan bahwa program keluarga harapan di kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik ditandai dengan berkurangnya beban pengeluaran dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan penulis yakni perlindungan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) yang memiliki tingkat keberhasilan program yang cukup baik walaupun belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan dan menyentuh seluruh masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif dengan informasi dan data yang didapat berbentuk kata atau gambar. Perlindungan sosial memiliki dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu program yang dilaksanakan telah berhasil menjawab tujuan program tersebut yaitu dengan menganalisis apakah program tersebut mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, dan mampu meningkatkan status sosial.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah dengan obyek penelitian yang terus berkembang tanpa ada manipulatif dan bersifat deskriptif dengan informasi

dan data yang didapat berbentuk kata atau gambar (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini kemudian dilakukan analisis data secara induktif dimana menjelaskan suatu fenomena yang diamati dan dilakukan pengumpulan data secara mendalam dengan fakta-fakta dilapangan kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan model wawancara terstruktur atau wawancara terpimpin dengan membawa sederetan pertanyaan dalam sebuah pedoman wawancara yang dilakukan terhadap para informan yang telah ditentukan sebelumnya berjumlah 27 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka 1 orang, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 orang, Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Sikka 1 orang, dan Tim Pendamping Lapangan 3 orang yang mana mereka adalah informan yang memahami terkait dengan permasalahan dan informasi yang akan diteliti serta masyarakat sebagai Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH perwakilan di setiap kecamatan di kabupaten sikka. Selanjutnya penulis juga melakukan observasi dengan turun langsung ke kantor dinas sosial kabupaten sikka dan ke setiap kecamatan untuk melihat kondisi penerima bantuan PKH serta masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan PKH. Adapun analisisnya menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dalam analisis data model Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapat sudah jenuh yang dilakukan dengan Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar

Penulis melakukan penelitian berkaitan dengan fungsi pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui bantuan PKH kemudian menganalisis berkaitan dengan indikator penelitian yaitu dimensi melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar.

a) Proses Seleksi Calon Penerima Manfaat PKH

Penulis melakukan analisis data terhadap proses seleksi calon penerima manfaat bantuan PKH. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan koordinator PKH Kabupaten Sikka Bapak Piet Wollo, pada hari Senin, 16 Januari 2023 yang mengatakan bahwa untuk mekanisme pendataan di Kabupaten Sikka sendiri pertama dilakukan pendataan lewat desa atau kelurahan nanti hasil pendataan keluarga miskin yang sudah terkumpul kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi untuk diteruskan kepada kementerian sosial. Setelah itu data tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pada tataran pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan proses pendataan sudah dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan sampai penetapan wilayah dan jumlah peserta di Kabupaten Sikka. Pendaftaran dilakukan oleh pihak kelurahan atau desa dalam waktu satu bulan, jadi setiap bulan pihak kelurahan dan desa melakukan pendataan data by-name-by-address (BNBA) yang mana hasil pendataan tersebut dan diinput dalam sistem data oleh operator sebagai data pegangan dan acuan untuk nanti kemudian data tersebut dihimpun dan disampaikan kepada pemda provinsi untuk diteruskan kepada menteri. Pendataan BNBA yang dilakukan memunculkan beberapa masalah, seperti mereka yang belum teregister dalam sistem data hampir dipastikan tidak dapat menerima bantuan PKH.

Gambar 1.
Alur Pendaftaran KPM PKH



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Adapun proses pendataan yang dilakukan berdasarkan pada gambar di atas terdiri dari 6 tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keluarga fakir miskin melakukan pendaftaran kepada pihak kelurahan atau desa dengan membawa KTP dan KK
- 2) Pihak kelurahan atau desa melalui kepala desa atau lurah menyampaikan data pendaftar kepada Bupati/Walikota melalui Camat
- 3) Bupati/Walikota melaporkan data pendaftar kepada Menteri Sosial melalui Gubernur
- 4) Pihak Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftar rumah tangga
- 5) Hasil verifikasi dan validasi akan dilakukan rapat penetapan, kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada Kementerian Sosial untuk ditetapkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 6) Penyaluran Bantuan PKH melalui kerjasama dengan Bank Penyalur dan PT. Pos Indonesia. Pada tataran pelaksanaan proses seleksi calon penerima manfaat di kabupaten sikka sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak dinas sosial.

Tabel 1.
Data Calon Penerima Bantuan Kab.Sikka 2019-2022

No	Tahun	Yang Terdata	Daftar Tunggu
1.	2019	16 212 jiwa	534 jiwa
2.	2020	17 251 jiwa	670 jiwa
3.	2021	18 958 jiwa	753 jiwa
4.	2022	23 285 jiwa	817 jiwa

Sumber: Bidang PKH Dinas Sosial Kab.Sikka 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang berada pada daftar tunggu hal ini disebabkan pada tahun berjalan tidak banyak penerima yang sebelumnya sudah selesai menerima keluar dari kelompok penerima sehingga mengharuskan calon penerima baru belum dapat masuk.

b) Verifikasi Dan Validasi Keluarga Penerima Manfaat

Penulis melakukan analisis data terhadap proses verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat PKH berkaitan dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi syarat verifikasi dan validasi serta yang masih berada dalam daftar tunggu atau dalam hal ini belum memenuhi syarat validasi data.

Tabel 2.

Data Validasi KPM PKH Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah	Memenuhi Syarat	Belum Memenuhi
1.	2018	19.035 jiwa	18.006 jiwa	1,029 jiwa
2.	2019	19.357 jiwa	16.212 jiwa	3,145 jiwa
3.	2020	19.689 jiwa	17.470 jiwa	2.219 jiwa
4.	2021	20.192 jiwa	19.047 jiwa	1.145 jiwa
5.	2022	23.590 jiwa	19.983 jiwa	3.607 jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka (diolah penulis)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak calon KPM yang belum memenuhi persyaratan validasi yang dilakukan, hal ini disebabkan keluarga tersebut tidak memiliki kriteria komponen yang ditetapkan oleh Kemensos baik itu komponen kesehatan, pendidikan, dan lansia serta disabilitas berat. Selain itu mereka tidak memiliki kelengkapan data kependudukan yang valid antara sistem data DTKS dan data dari dinas kependudukan, selain itu dikarenakan kondisi asli mereka yang bisa dikatakan mampu sehingga tidak seharusnya mendapat bantuan. Pada pelaksanaan pihak dinas sosial telah melaksanakan tugas dengan baik berkaitan dengan kegiatan validasi data KPM calon penerima manfaat PKH, sehingga bisa mendapatkan data yang valid, bagi calon peserta yang tidak memenuhi proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH maka sudah dipastikan tidak dapat menerima bantuan dan bagi yang masuk dalam daftar tunggu akan diberikan waktu untuk melengkapi data dan mengikuti proses validasi dan verifikasi di periode selanjutnya. Sedangkan bagi yang sudah dengan status eligible (memenuhi syarat) akan menunggu keputusan Kemensos untuk mengelolah data tersebut dan ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH.

Tabel 3.

Penetapan KPM PKH Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah KPM
1.	2018	18.006 jiwa
2.	2019	16.212 jiwa
3.	2020	17.470 jiwa
4.	2021	19.047 jiwa
5.	2022	19.811 jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2023

Dari Tabel di atas dapat diketahui jumlah keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Kemensos untuk menerima bantuan PKH, sampai tahun 2022 kemarin telah dilakukan penyaluran dari tahap 1 hingga tahap 4 dan pada bulan Desember 2022 kemarin telah dilakukan pemutakhiran data untuk penetapan jumlah penerima pada tahun 2023.

c) Pemberian Bantuan PKH Komponen Kesehatan

Penulis melakukan analisis data terhadap proses pemberian bantuan PKH di komponen kesehatan yang terdiri dari sasaran, syarat, dan besaran bantuan PKH komponen kesehatan serta melakukan pendataan terhadap keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan komponen kesehatan di Kabupaten Sikka yang terdiri dari beberapa kecamatan.

Tabel 4.

Sasaran, Syarat, dan Besaran Bantuan PKH Komponen Kesehatan

No	Sasaran	Persyaratan	Bantuan /Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ibu Hamil	Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan di faskes terdekat minimal 4 kali selama kehamilan dan melahirkan di faskes.	Rp. 3.000.000
2.	Ibu Nifas	Pemeriksaan kesehatan minimal 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan	Rp. 3.000.000
3.	Bayi Usia 0-11 Bulan	Pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam bulan pertama, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, imunisasi, melaksanakan kegiatan posyandu, mendapat multivitamin 2 kali setahun	Rp.3.000.000
4.	Usia 1-6 Tahun	Imunisasi tambahan, ikut posyandu minimal 2 kali setahun, pemantauan perkembangan 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin 2 kali setahun	Rp. 3.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerima manfaat komponen kesehatan akan menerima bantuan uang sejumlah tiga juta yang akan diterimakan setiap tiga bulan sekali dalam satu tahun, mereka juga akan mendapat bantuan sembako berupa beras dan telur untuk menunjang kebutuhan hidup. Selain mendapatkan hak berupa uang, penerima manfaat wajib melaksanakan kegiatan yang sudah di syaratkan kepada mereka berkaitan dengan kesehatan Ibu hamil, Ibu Nifas dan Anak usia dini. Kewajiban tersebut harus dijalankan minimal sekali dalam sebulan sehingga bantuan tersebut benar adanya bermanfaat bagi mereka, dan bagi mereka yang tidak menjalankan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi berupa satu kali tidak mendapatkan bantuan.

Tabel 5.

Jumlah KPM Komponen Kesehatan Kecamatan Alok

No	Kelurahan	Kesehatan		
		Ibu Hamil/Nifas	Usia Dini	Lahir Faskes
1.	Kabor	0	4	0
2.	Nangalimang	0	18	0
3.	Samparong	1	28	21

4.	Pemana	0	28	24
Total		1	78	45

Sumber: Dinas Sosial Kab.Sikka Bidang PKH (diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk jumlah penerima manfaat komponen kesehatan di Kecamatan Alok, yang dimana dari jumlah penerima secara keseluruhan terdapat 124 KPM menerima komponen kesehatan baik itu Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Anak usia dini. Bantuan PKH komponen kesehatan hadir sejalan dengan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan upaya memberikan layanan sosial kepada keluarga miskin dan rentan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar lewat stimulan dana berupa uang. Selain mendapat dana bantuan berupa uang yang di transfer lewat rekening para penerima, mereka pun menerima bantuan pangan non tunai atau BPNT yang diberikan pemerintah berupa bantuan beras dan telur yang diterima bersamaan dengan penyaluran bantuan PKH komponen kesehatan.

d) Pemberian Bantuan PKH Komponen Kesejahteraan Sosial

Penulis melakukan analisis data terhadap pemberian bantuan PKH Komponen Kesejahteraan Sosial di kabupaten sikka yang merujuk kepada berbagai pelayanan kepada kelompok usia rentan atau lanjut usia serta kelompok disabilitas berat.

Tabel 6.

Sasaran, Syarat, dan Besaran Bantuan PKH Komponen Kesos

No (1)	Sasaran (2)	Persyaratan (3)	Bantuan /Tahun (4)
1.	Lanjut Usia	Seseorang yang berusia lanjut dan tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga	Rp. 2.400.000
2.	Penyandang disabilitas berat	Penyandang disabilitas yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya dan bergantung pada orang lain. Tercatat dalam kertu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga	Rp. 2.400.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Bidang Linjamsos (diolah penulis)

Bantuan PKH di komponen kesejahteraan sosial diberikan kepada penerima yang sudah lanjut usia atau yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Hal ini melihat dari kondisi mereka yang sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan atau yang hidup sendiri dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu untuk komponen kesejahteraan sosial juga diberikan kepada penderita disabilitas atau cacat berat yang pastinya mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas, maka dari itu mereka perlu mendapat perlindungan dari pemerintah lewat bantuan sosial agar tetap memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Tabel 7.

Jumlah KPM Komponen Kesos Kecamatan Alok Barat

No	Kelurahan	Kesejahteraan Sosial	
		Lansia	Disabilitas
1.	Wailiti	2	1

2.	Wolomarang	5	1
3.	Hewuli	3	0
4.	Wuring	2	0
Total		12	2

Sumber: Dinas Sosial Kab.Sikka Bidang PKH (diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah KPM komponen kesejahteraan sosial yang tersebar di Kecamatan Alok Barat berjumlah 14 KPM, dengan pembagian 12 KPM menerima bantuan lansia dan sisanya 2 KPM menerima bantuan disabilitas berat.

Dalam menerima bantuan PKH komponen kesejahteraan sosial, KPM tidak hanya berhak mendapat bantuan namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari bantuan tersebut seperti bagi penyandang disabilitas akan mendapat layanan home visit yaitu tenaga kesehatan datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan dan home care yaitu pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH. Bagi lansia 60 tahun ke atas akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, akan mendapat layanan home care, pelayanan puskesmas santun lanjut usia dan layanan day care (mengikuti kegiatan sosial olahraga pagi) minimal 1 bulan sekali.

3.2 Meningkatkan Status Sosial

Perlindungan sosial merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menangani masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Upaya perlindungan sosial yang diwujudkan melalui bantuan sosial salah satu harapannya yaitu dengan menerima bantuan masyarakat tersebut mampu meningkatkan status sosial dan menjadi berdaya.

a) Pemberian Bantuan PKH Komponen Pendidikan

Penulis melakukan analisis data terhadap pemberian bantuan PKH komponen kesehatan yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapat pendidikan dengan syarat dan besaran bantuan yang diberikan.

Tabel 8.

Sasaran, Syarat, dan Besaran Bantuan PKH Komponen Pendidikan

No	Sasaran	Persyaratan	Bantuan /Tahun
1.	Usia 6-21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar	1. Terdaftar di sekolah kesetaraan 2. Minimal 85% kehadiran	SD Rp. 900.000
2.	Usia 6-21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Terdaftar di sekolah kesetaraan 2. Minimal 85% kehadiran	SMP Rp. 1.500.000
3.	Usia 6-21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Terdaftar di sekolah kesetaraan 2. Minimal 85% kehadiran	SMA Rp. 2.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka 2022

Berdasarkan tabel di atas, untuk komponen pendidikan, keluarga penerima manfaat yang telah menerima bantuan harus mendaftarkan anak mereka ke sekolah untuk mengikuti pendidikan dan ketika sudah didaftarkan harus mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 85% dari total kehadiran yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar 12 tahun. Selain itu bantuan yang diterima harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak seperti, seragam, buku, sepatu, tas dan lainnya sehingga tujuan dari bantuan ini dapat tercapai untuk membantu pendidikan penerima bantuan.

Tabel 9.
Jumlah KPM Komponen Kesos Kecamatan Alok Timur

No	Kelurahan	Pendidikan		
		SD	SMP	SMA
1.	Beru	10	4	8
2.	Kojadoi	30	7	5
3.	Nangameting	7	5	12
4.	Kota Baru	4	6	9
5.	Lepolima	22	38	35
6.	Waioti	8	4	9
7.	Parumaan	39	20	20
8.	Wairotang	11	5	14
9.	Watugong	59	40	40
10.	Kojagete	15	8	10
Total		205	129	202

Sumber : Dinas Sosial Kab.Sikka, Bidang PKH (diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima manfaat di komponen pendidikan yang tersebar di Kecamatan Alok Timur terbilang cukup banyak yang terdiri dari SD 205 KPM, SMP 129 KPM, dan SMA 202 KPM. Data dari tabel di atas penulis jadikan acuan dan gambaran untuk jumlah penerima bantuan PKH komponen pendidikan di Kabupaten Sikka yang mana lewat bantuan ini banyak anak-anak di Sikka khususnya di Kecamatan Alok Timur terbantu untuk mengenyam pendidikan baik dari tingkat SD sampai SMA. Bantuan ini telah dilaksanakan dan disalurkan kepada penerima sesuai sasaran, dan dapat dibuktikan bahwa anak-anak dari penerima bantuan telah mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah dengan ketentuan kewajiban yang ada.

b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Penulis melakukan analisis data terhadap kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dalam upaya meningkatkan status sosial melalui kegiatan transfer knowledge kepada penerima manfaat lewat pendampingan tim PKH dil lapangan.

Gambar 10.
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)



Sumber: Dinas Sosial Kab.Sikka Bidang Linjamsos

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa melalui kegiatan P2K2 diharapkan memberikan intervensi untuk perubahan perilaku yang diberikan kepada peserta PKH, selanjutnya proses belajar yang dilakukan mampu meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin. Pelaksanaan kegiatan P2K2 dilakukan setiap satu bulan selama masa kepesertaan PKH di dalam suatu kelompok dampingan. Peran para pendamping sosial sudah sangat baik, dimana setiap satu bulan sekali mereka mengadakan pertemuan kelompok sekaligus memberikan pendidikan P2K2 kepada peserta dan respon baik pun diterima dari peserta PKH. Namun pada pelaksanaan tidak semua sesuai harapan, terkadang ada saja para peserta PKH yang tidak ikut hadir dalam kegiatan P2K2, hal ini yang menjadi kendala untuk keberhasilan dari program tersebut.

c) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Penulis melakukan analisis data terhadap pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang berkaitan dengan upaya pemerintah melalui bantuan PKH untuk memberi bantuan dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat, sehingga masyarakat tersebut tidak hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan pemerintah namun dapat berhasil sendiri dan keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 10.
Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Sikka

No	Jenis Usaha	Kecamatan	Besar Bantuan
1.	Penyuluh Perikanan (Baby Tuna, Cakalang, dan Ikan Terbang)	Kecamatan Kangae (Lusia Niron)	Rp. 2.000.000
2.	Peternakan (Sapi dan Babi)	Kecamatan Nelle	Rp. 2.000.000
3.	Tenun Ikat	Kecamatan Alok Timur dan Kecamatan Waiblama	Rp. 2.000.000
4.	Perkebunan	Kecamatan Talibura	Rp. 2.000.000

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada empat jenis usaha yang dilakukan di Kabupaten Sikka, dan tersebar di beberapa Kecamatan. Setiap usaha diberikan dana sebesar Rp. 2.000.000 dan pada pelaksanaannya keuntungan yang di dapat cukup baik. Tentu saja bantuan KUBE ini jika dijalankan dengan baik pasti akan meraih hasil yang baik juga, dan kelompok yang menjalankan usaha tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan namun perlu mengembangkan usaha mereka sehingga kedepannya kelompok tersebut dapat berdaya dan mampu meningkatkan status sosial mereka. Namun seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka bahwa sejak tahun 2022 kemarin KUBE ini tidak dijalankan lagi dikarenakan ini merupakan program provinsi dan Kabupaten Sikka tidak mendapatkan kuota untuk tahun tersebut dan tentunya ada hal lain yang belum dijelaskan alasannya maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak Dinas Sosial melakukan upaya dengan membuat upaya pemberdayaan sosial melalui UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam) di kelompok penerima bantuan PKH, seperti yang disampaikan oleh Koordinator PKH Kabupaten Sikka. Untuk mekanismenya usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan pengumpulan uang antar penerima dalam satu kelompok dengan tujuan jika suatu saat ada salah satu penerima yang membutuhkan dana dapat menggunakan dana dari simpan pinjam yang kemudian dapat diganti kembali jika sudah memiliki dana kembali. UBSP dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat mengganti bantuan KUBE yang sebelumnya pun telah dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sikka.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sikka telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Bantuan PKH merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan memberikan stimulan bantuan berupa tunai maupun non tunai agar bias membantu keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penulis menemukan temuan penting yakni bantuan PKH sangat membantu keluarga miskin di Kabupaten Sikka untuk memenuhi kebutuhan di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan sosial, bagi ibu hamil dan anak usia dini merasa terbantu dengan bantuan kesehatan yang diberikan, bagi anak-anak usia pelajar bisa memperoleh pendidikan, dan bagi para lansia serta disabilitas berat bisa tertolong dengan bantuan PKH tersebut. Layaknya program-program bantuan, PKH sendiri memiliki syarat-syarat serta sasaran bantuan yang ditujukan khusus bagi masyarakat tidak mampu yang telah memenuhi kriteria penerima bantuan seperti yang ditetapkan Kementerian Sosial. Para penerima bantuan tidak langsung menerima bantuan melainkan akan melewati beberapa proses, mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi data, kemudian penetapan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Adapun program ini memiliki beberapa kekurangan dalam proses pendataan, seperti ada keluarga penerima manfaat yang telah dikatakan mampu masih terus menerima bantuan PKH, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu lainnya yang belum menerima bantuan harus berada di daftar tunggu dan sampai sekarang belum bisa masuk kedalam penerima bantuan, hal ini dikarenakan proses pembaharuan data yang tidak dilakukan secara rutin oleh pihak pengelola data sehingga data yang dipakai merupakan data lama dan penerima bantuan tidak berubah. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai seberapa berhasil program ini sehingga kedepannya ada perubahan baik yang dilakukan guna mensukseskan tujuan dari bantuan tersebut. Maka dari itu dengan adanya program ini diharapkan mampu melindungi masyarakat

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar serta untuk meningkatkan status sosial mereka lewat bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan factor penghambat perlindungan sosial melalui bantuan PKH yakni pembaharuan data yang tidak dilakukan secara rutin, kurangnya sosialisasi antara dinas sosial kepada masyarakat, dinonaktifkan aplikasi e-PKH yang mambantu tim pendamping lapangan dalam validasi data serta kurang kesadaran penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan PKH dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara umum sudah berjalan baik namun belum maksimal dan tepat sasaran. Hal tersebut ditandai dengan proses pendataan dan pembaharuan data penerima bantuan jarang dilakukan, pelaksanaan validasi dan verifikasi data beberapa tahun kebelakang dilakukan dipusat karena terkendala dana dan para pendamping tidak dapat melakukan validasi dan verifikasi secara langsung dikarenakan aplikasi e-PKH telah di nonaktifkan, kurangnya sosialisasi kepada penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dengan baik serta penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE tidak dilanjutkan kembali. Penulis menyarankan agar ada tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam hal ini pihak kelurahan atau desa serta pihak operator data agar aktif dalam melakukan pembaharuan data penerima, selain itu pihak kementerian sosial perlu untuk mengaktifkan kembali aplikasi e-PKH untuk mempermudah tim pendamping lapangan melakukan validasi dan verifikasi data, serta perlu keaktifan dari pihak dinas sosial khususnya bidang perlindungan dan jaminan sosial untuk memberikan sosialisasi, dan perlu ada inisiatif dari penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga mampu bangkit dari kondisi miskin dan mau berdaya sehingga tidak bergantung hanya kepada bantuan sosial PKH.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan kurang lebih dua minggu sehingga waktunya tidak cukup untuk menjangkau 21 Kecamatan di Kabupaten Sikka.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih terbatasnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perlindungan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sikka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan terutama kepada pemerintah daerah kabupaten sikka secara khusus pihak Dinas Sosial beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mendoakan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angling Nugroho Kemenangan. “REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL INDONESIA.” Direktorat Jenderal Anggaran. Last modified 2021. Accessed November 7, 2022. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>.
- Ayu Rifka Sitoresmi. “Tujuan Negara Republik Indonesia Sesuai UUD 1945 Alinea 4.” Liputan6. Last modified 2021. Accessed November 7, 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4617955/tujuan-negara-republik-indonesia-sesuai-uud-1945-alinea-4-ini-penjelarasannya>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Statistik Indonesia 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, (2022). *Kabupaten Sikka Dalam Angka 2022*. BPS Kab.Sikka
- Bagong Suyanto, “Perlindungan Sosial Bagi Anak – Anak Miskin Di Perkotaan,” *Locus* 13, no. 2 (2019): 62–78.
- Baso Iping, “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial” (2020).
- Desy Vijayanti dan Helly Ocktilia, “Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin Peserta Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Buton Selatan” *Jurnal LINDAYASOS* vol. 1 no. 2 (2019).
- Julianty Takaredase, J. E. Kaawoan dan Frans Singkoh “Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng” *Jurnal eksekutif* vol. 3 No. 3 (2020).
- Muhammad luthfi, “Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB,” *jurnal comm-edu* vol. 1 no. 1(2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Edited by MT Dr. Ir. Sutopo. S.Pd. Bandung: Alfabeta, 2019.

